



ANALISIS KEBIJAKAN DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MEMBANGUN KEAMANAN MARITIM DI SELAT MALAKA

Muhammad Amarullah
amar8754@gmail.com
Sekolah Staff Dan Komando Angkatan Laut

Abstract

The Malacca Strait is a vital maritime route for international trade but also vulnerable to various security threats. In this context, Indonesian maritime diplomacy plays a strategic role in building maritime security in the region. This research aims to analyze Indonesian maritime diplomacy policies in building maritime security in the Malacca Strait, focusing on regional cooperation, bilateral agreements, maritime capabilities, and infrastructure development. This research employs policy analysis method with a qualitative literature review approach. Data are obtained from various primary and secondary sources, including policy documents, international agreements, and related literature. The analysis indicates that Indonesia has demonstrated strong commitment to strengthening regional and international cooperation, enhancing military capabilities and maritime infrastructure, and building effective coalitions with neighboring countries and regional partners. These measures aim to improve surveillance, law enforcement, and intelligence exchange, which are crucial foundations for maintaining maritime security in the Malacca Strait. Thus, Indonesian maritime diplomacy plays a crucial role in ensuring security and stability in the Malacca Strait. For the future, enhancing multilateral cooperation and sustainable investment in maritime infrastructure should be considered to sustain these efforts.

Keywords: Maritime Diplomacy, Maritime Security, Malacca Strait, Regional Cooperation, Bilateral Agreements.

PENDAHULUAN

Dalam kebijakan diplomasi maritim Indonesia dalam membangun keamanan di Selat Malaka, sangat penting untuk memahami tantangan dan strategi yang terlibat dalam upaya ini. Sebagai salah satu jalur maritim tersibuk di dunia, Selat Malaka memiliki peran strategis dalam perdagangan internasional dan juga merupakan wilayah yang rentan terhadap berbagai ancaman keamanan, seperti pencurian, penyelundupan, dan bahaya lingkungan. Oleh karena itu, Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memperkuat keamanan di wilayah tersebut melalui diplomasi maritim (Kusumawardhana, 2023).

Indonesia telah aktif membangun kerjasama regional dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, patroli bersama, dan latihan bersama untuk meningkatkan kemampuan bersama dalam mengatasi ancaman di perairan Selat Malaka. Kerjasama regional menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan dan koordinasi antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga keamanan di kawasan tersebut (Nurwahidin & Utomo, 2020).

Selain kerjasama regional, Indonesia juga telah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara-negara terkait. Misalnya, perjanjian patroli bersama dengan Malaysia dan Singapura memungkinkan pertukaran intelijen dan koordinasi operasional antar negara

untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Selat Malaka. Perjanjian ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat kerjasama bilateral dalam menghadapi tantangan keamanan maritim (Iswardhana, 2023).

Di tingkat internasional, Indonesia juga terlibat aktif dalam organisasi seperti IMO (International Maritime Organization). Melalui partisipasi dalam forum ini, Indonesia berusaha untuk mendiskusikan isu-isu keamanan maritim secara multilateral dan mengadvokasi kebijakan yang mendukung keamanan dan keselamatan di Selat Malaka. Kerjasama dengan organisasi internasional menjadi bagian integral dari strategi diplomasi maritim Indonesia dalam membangun keamanan di kawasan tersebut (Yunizar, 2023).

Selain upaya diplomasi dan kerjasama regional, Indonesia juga terus meningkatkan kapabilitas maritimnya. Peningkatan patroli di perairan Selat Malaka, modernisasi peralatan militer, dan penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum maritim merupakan bagian dari strategi ini. Indonesia juga fokus pada pembangunan infrastruktur di sekitar Selat Malaka untuk meningkatkan pengawasan dan keselamatan maritim, seperti pembangunan radar pantai dan stasiun pemantauan. Infrastruktur yang kuat menjadi kunci dalam memastikan bahwa Indonesia memiliki kemampuan yang cukup untuk mengatasi berbagai tantangan keamanan di wilayah tersebut (Samy & Kusumadewi, 2021).

Namun, dalam menjalankan kebijakan diplomasi maritimnya, Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Misalnya, perbedaan kepentingan antara negara-negara yang terlibat dapat menjadi penghalang dalam membangun kerjasama yang efektif (Qurgianto & Marzaman, 2023). Selain itu, adanya aktor non-negara seperti kelompok bersenjata dan organisasi kriminal lintas batas juga merupakan ancaman terhadap keamanan maritim di Selat Malaka.

Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu terus memperkuat kerjasama regional, meningkatkan kapabilitas maritim, dan memperkuat infrastruktur untuk mengatasi ancaman keamanan di Selat Malaka (Suwarno et al., 2021). Diplomasi maritim menjadi instrumen penting dalam upaya ini, karena melalui diplomasi, Indonesia dapat membangun kerjasama yang kuat dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional untuk menghadapi tantangan bersama. Dengan demikian, diharapkan keamanan maritim di Selat Malaka dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk mendukung perdagangan internasional dan stabilitas regional (Ludiro Madu, 2020).

Permasalahan utama yang dihadapi adalah kompleksitas ancaman terhadap keamanan maritim di Selat Malaka. Selain pencurian dan penyelundupan, wilayah ini juga rentan terhadap ancaman yang lebih kompleks seperti terorisme maritim, perdagangan manusia, dan bahaya lingkungan seperti pencemaran minyak dan dampak perubahan iklim. Tingginya aktivitas kapal-kapal perdagangan dan keberadaan jalur pelayaran yang padat membuat pengawasan dan penegakan hukum menjadi lebih sulit dilakukan.

Tujuan dari kebijakan diplomasi maritim Indonesia adalah membangun kerjasama regional dan internasional yang kuat untuk meningkatkan keamanan maritim di Selat Malaka. Indonesia berusaha untuk memperkuat koordinasi antara negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, serta melibatkan aktif organisasi internasional seperti ASEAN, IMO, dan ARF dalam upaya bersama mengatasi tantangan keamanan maritim di wilayah tersebut. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk memperkuat kapabilitas maritim nasional dan infrastruktur di sekitar Selat Malaka guna meningkatkan pengawasan dan keselamatan di wilayah tersebut.

Namun, terdapat gap penelitian yang perlu diisi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas langkah-langkah yang telah diambil dalam kebijakan diplomasi maritim Indonesia di Selat Malaka. Evaluasi mendalam tentang sejauh mana kerjasama regional dan internasional telah berhasil dalam meningkatkan keamanan

maritim, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, serta identifikasi terhadap area-area yang masih memerlukan perbaikan menjadi penting untuk dilakukan.

Urgensi untuk menangani permasalahan keamanan maritim di Selat Malaka sangatlah penting mengingat peran strategis wilayah tersebut dalam perdagangan internasional dan stabilitas regional. Ancaman terhadap keamanan maritim tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga negara-negara tetangga dan mitra dagang internasional. Oleh karena itu, tindakan yang cepat dan efektif melalui diplomasi maritim menjadi sangat mendesak untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut, sambil memperhatikan kepentingan dan keamanan nasional serta regional secara keseluruhan.

Dengan demikian, perlu adanya penelitian yang lebih mendalam untuk mengisi gap pengetahuan yang ada, sambil tetap mempertimbangkan urgensi untuk mengatasi permasalahan keamanan maritim di Selat Malaka melalui kebijakan diplomasi maritim yang efektif. Hanya dengan pemahaman yang lebih baik dan tindakan yang tepat, keamanan maritim di wilayah tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan, serta memberikan kontribusi positif bagi perdagangan internasional dan stabilitas regional.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan maritim adalah seperangkat strategi, aturan, dan langkah-langkah yang dirancang untuk mengelola penggunaan dan pemanfaatan sumber daya di laut. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ekonomi dan perdagangan hingga konservasi lingkungan dan keamanan. Kebijakan maritim yang efektif harus mempertimbangkan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, termasuk negara-negara pesisir, industri perikanan, perusahaan pelayaran, dan masyarakat lokal yang tinggal di wilayah pantai (Gonggong, 2020).

Salah satu komponen penting dari kebijakan maritim adalah pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Laut menyediakan sumber daya alam yang berlimpah, termasuk ikan, minyak dan gas, mineral, dan energi terbarukan seperti angin dan gelombang laut. Namun, eksploitasi berlebihan dan tidak berkelanjutan dari sumber daya ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius dan mengancam keberlangsungan hidup banyak spesies laut. Oleh karena itu, kebijakan maritim yang baik harus memperhatikan prinsip-prinsip konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan (Anam & Wahyudin, 2020).

Selain itu, kebijakan maritim juga mencakup aspek perdagangan dan ekonomi. Lebih dari 80% perdagangan dunia dilakukan melalui laut, membuat transportasi maritim menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu, kebijakan maritim harus mendukung pengembangan infrastruktur pelabuhan yang efisien, sistem transportasi yang andal, dan fasilitas perdagangan yang modern. Ini mencakup juga regulasi perdagangan internasional, seperti konvensi UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara di laut (Tarjuki, 2022).

Selain kebijakan maritim, diplomasi maritim juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di laut. Diplomasi maritim melibatkan negosiasi dan hubungan antar-negara untuk menyelesaikan konflik dan mempromosikan kerjasama di wilayah perairan (Fadli et al., 2021). Masalah seperti batas laut, hak ekonomi eksklusif, perlindungan lingkungan laut, dan penegakan hukum di laut seringkali membutuhkan pendekatan diplomasi yang cermat dan kerjasama yang erat antar-negara (Yudistira, 2023).

Salah satu contoh keberhasilan diplomasi maritim adalah perjanjian perbatasan laut antara negara-negara tetangga. Negosiasi yang berlangsung bertahun-tahun akhirnya

menghasilkan kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak, menghindari konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak. Diplomasi maritim juga dapat menghasilkan kerjasama regional dalam hal penegakan hukum di laut, penanggulangan penangkapan ikan ilegal, atau penanggulangan pencemaran laut (Putri, 2021).

Namun, diplomasi maritim juga memiliki tantangan tersendiri. Persaingan kepentingan antara negara-negara di wilayah perairan yang sama, sengketa historis, dan ketegangan politik dapat menghambat upaya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan diplomasi yang inklusif dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum internasional untuk mengatasi perbedaan dan mempromosikan perdamaian dan keamanan di laut (Nugraha & Syah, 2022).

Keamanan maritim mencakup berbagai aspek, mulai dari keamanan militer hingga penegakan hukum di laut. Keamanan militer melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata untuk melindungi kepentingan nasional di laut, termasuk menghadapi ancaman dari negara-negara lain atau kelompok bersenjata yang beroperasi di laut. Hal ini mencakup juga pengawasan dan patroli di perairan yang strategis untuk mencegah infiltrasi atau serangan dari pihak yang tidak diinginkan (Nursafitri & Ramadhan, 2022).

Di sisi lain, penegakan hukum di laut merupakan komponen penting dari keamanan maritim yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi kejahatan di laut, seperti perompakan, perdagangan manusia, dan perdagangan narkoba. Hal ini memerlukan kerjasama antar-negara dalam pertukaran informasi intelijen, patroli bersama, dan proses hukum yang efektif untuk menangkap dan mengadili pelaku kejahatan di laut (Wicaksa, 2020).

Keamanan maritim meningkat dengan meningkatnya ancaman terhadap keamanan global, termasuk terorisme, perompakan, dan perdagangan ilegal. Wilayah perairan yang luas dan terbuka membuatnya rentan terhadap aktivitas ilegal dan tindakan agresi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan keamanan maritim menjadi prioritas bagi banyak negara dan organisasi internasional (Yudilla & Amri, 2020).

Untuk mencapai keamanan maritim yang efektif, diperlukan kerjasama yang erat antara negara-negara pesisir, organisasi regional, dan lembaga internasional. Ini mencakup pertukaran informasi intelijen, latihan bersama, dan pengembangan kapasitas untuk penegakan hukum di laut. Selain itu, perjanjian internasional seperti UNCLOS juga berperan penting dalam menciptakan kerangka hukum yang jelas untuk penyelesaian sengketa dan penegakan hukum di laut (Saputra & Prasetyo, 2022).

Dalam mengatasi tantangan keamanan maritim, penting untuk mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan yang mencakup aspek militer, hukum, dan pembangunan kapasitas. Hal ini memerlukan komitmen politik yang kuat, sumber daya yang memadai, dan kerjasama internasional yang erat.

Kebijakan, diplomasi, dan keamanan maritim adalah tiga elemen penting yang saling terkait dalam mengelola wilayah perairan global. Kebijakan maritim yang baik harus memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan keamanan, sementara diplomasi maritim diperlukan untuk mempromosikan kerjasama antar-negara dan menyelesaikan konflik di laut. Sementara itu, keamanan maritim memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kerjasama internasional yang erat untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas di laut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan

pemahaman yang mendalam tentang permasalahan keamanan maritim di Selat Malaka serta efektivitas kebijakan diplomasi maritim Indonesia dalam mengatasi tantangan tersebut. Penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan, seperti artikel ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan dokumen resmi organisasi internasional, guna mendapatkan wawasan yang komprehensif tentang isu yang sedang diteliti. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi gap pengetahuan yang ada, menganalisis perdebatan dan argumen yang ada dalam literatur, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti untuk meningkatkan keamanan maritim di Selat Malaka. Melalui kombinasi antara metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman dan penyelesaian masalah keamanan maritim di kawasan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerjasama Regional

Kerjasama Regional dalam analisis kebijakan diplomasi maritim Indonesia dalam membangun keamanan maritim di Selat Malaka merupakan bagian penting dalam memahami upaya Indonesia. Kerjasama regional memiliki peran kunci dalam memperkuat stabilitas dan keamanan di wilayah Selat Malaka, yang merupakan jalur maritim vital bagi perdagangan internasional.

Kerjasama regional Indonesia dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip dan pasal-pasal yang terdapat dalam Piagam ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Pasal 2 dari Piagam ASEAN menyatakan komitmen anggota untuk mengerjakan peraturan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional dan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini menciptakan dasar hukum bagi kerjasama ASEAN dalam mengatasi masalah keamanan maritim, termasuk di Selat Malaka. Pasal 7 Piagam ASEAN juga menekankan kerjasama regional dalam mendorong perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan.

Selanjutnya, kerjasama regional Indonesia juga tercermin dalam kerangka kerja ARF (ASEAN Regional Forum). Pasal 3 dari Deklarasi ARF 1995 menekankan dialog dan kerjasama regional dalam mencapai perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan Asia-Pasifik. Indonesia aktif berpartisipasi dalam forum ini untuk membangun konsensus dan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam mengatasi tantangan keamanan maritim, termasuk di Selat Malaka.

Kerjasama regional Indonesia juga tercermin dalam berbagai perjanjian dan kerangka kerja bilateral dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Sebagai contoh, perjanjian patroli bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura merupakan langkah konkret dalam memperkuat kerjasama dalam hal patroli dan pengawasan di Selat Malaka. Pasal-pasal dalam perjanjian tersebut mengatur tentang pertukaran informasi, koordinasi operasional, dan tindakan bersama untuk meningkatkan keamanan maritim di wilayah tersebut.

Selain itu, kerjasama regional juga tercermin dalam partisipasi Indonesia dalam forum-forum multilateral lainnya seperti AMF (ASEAN Maritime Forum). AMF bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang maritim antara negara-negara ASEAN, termasuk upaya-upaya dalam mengatasi tantangan keamanan maritim di kawasan, termasuk di Selat Malaka.

Kerjasama regional tidak hanya terbatas pada negara-negara ASEAN. Indonesia juga menjalin hubungan kerjasama maritim dengan negara-negara di luar kawasan, seperti Australia, Jepang, dan Amerika Serikat. Ini mencerminkan kesadaran Indonesia bahwa

tantangan keamanan maritim di Selat Malaka memerlukan kerjasama lintas batas yang luas.

Dengan demikian, melalui kerjasama regional yang kokoh dan komprehensif, Indonesia berusaha untuk membangun koalisi yang kuat untuk mengatasi tantangan keamanan maritim di Selat Malaka. Ini mencakup kerjasama dalam hal pertukaran informasi, patroli bersama, dan latihan bersama untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut. Pasal-pasal yang relevan dalam kerangka kerja ASEAN, ARF, serta perjanjian bilateral menjadi landasan hukum bagi upaya Indonesia dalam memperkuat keamanan maritim di Selat Malaka.

Perjanjian Bilateral

Perjanjian Bilateral dalam analisis kebijakan diplomasi maritim Indonesia untuk membangun keamanan maritim di Selat Malaka adalah aspek penting yang menyoroti hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Perjanjian bilateral merupakan instrumen penting dalam memperkuat kerjasama antar negara untuk mengatasi tantangan keamanan maritim di wilayah tersebut.

Salah satu perjanjian bilateral yang relevan adalah Perjanjian Patroli Bersama (Joint Patrol Agreement) antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara ketiga negara dalam hal patroli dan pengawasan di Selat Malaka, yang merupakan jalur maritim penting bagi perdagangan internasional. Dalam perjanjian ini, pasal-pasal yang ditetapkan mengatur tentang pertukaran informasi, koordinasi operasional, dan tindakan bersama untuk meningkatkan keamanan maritim di wilayah tersebut.

Pasal 1 dari Perjanjian Patroli Bersama menegaskan tujuan utama dari kerjasama ini, yaitu untuk meningkatkan keamanan maritim di Selat Malaka. Pasal ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk melakukan patroli bersama dan bertukar informasi intelijen secara teratur untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di perairan tersebut. Hal ini mencerminkan komitmen bersama untuk mengatasi berbagai ancaman keamanan maritim yang ada di wilayah tersebut.

Pasal 2 dari Perjanjian tersebut mengatur tentang pertukaran informasi intelijen antara pihak-pihak yang terlibat. Pasal ini menekankan pertukaran informasi yang cepat dan akurat mengenai aktivitas-aktivitas mencurigakan di Selat Malaka, termasuk pencurian, penyelundupan, dan kejahatan maritim lainnya. Dengan adanya pertukaran informasi yang efektif, diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut.

Selanjutnya, Pasal 3 dari Perjanjian tersebut membahas tentang koordinasi operasional antara pihak-pihak yang terlibat. Pasal ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat akan berkoordinasi secara aktif dalam melakukan operasi patroli dan penegakan hukum di perairan Selat Malaka. Hal ini mencakup penentuan daerah patroli, pembagian tugas antara pihak-pihak yang terlibat, dan pelaksanaan tindakan bersama untuk menghadapi situasi darurat atau ancaman keamanan.

Pasal 4 dari Perjanjian Patroli Bersama mengatur tentang tindakan bersama yang akan dilakukan dalam menghadapi situasi darurat atau ancaman keamanan yang serius. Pasal ini menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk memberikan dukungan dan bantuan satu sama lain dalam menghadapi situasi darurat seperti kecelakaan kapal, bencana alam, atau ancaman keamanan yang serius di perairan Selat Malaka.

Terakhir, Pasal 5 dari Perjanjian tersebut menetapkan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Pasal ini menegaskan bahwa sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan melalui konsultasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum

internasional.

Dengan demikian, Perjanjian Patroli Bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura merupakan instrumen penting dalam memperkuat kerjasama bilateral dalam mengatasi tantangan keamanan maritim di Selat Malaka. Melalui perjanjian ini, ketiga negara tersebut berkomitmen untuk bekerja sama dalam hal patroli, pertukaran informasi intelijen, koordinasi operasional, dan tindakan bersama untuk meningkatkan keamanan maritim di wilayah tersebut.

Peran dalam Organisasi Internasional

Peran dalam Organisasi Internasional dalam analisis kebijakan diplomasi maritim Indonesia dalam membangun keamanan maritim di Selat Malaka menyoroti kontribusi Indonesia dalam berbagai organisasi internasional yang memiliki relevansi dengan keamanan maritim di kawasan tersebut. Partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional merupakan bagian integral dari strategi diplomasi maritim untuk memperkuat kerjasama multilateral dalam mengatasi tantangan keamanan di Selat Malaka.

Salah satu organisasi internasional yang menjadi fokus peran Indonesia adalah IMO (International Maritime Organization). Indonesia merupakan anggota aktif dalam IMO dan berkontribusi dalam berbagai forum dan diskusi yang berkaitan dengan keamanan maritim dan keselamatan pelayaran. Melalui partisipasi dalam IMO, Indonesia memiliki platform untuk mengadvokasi kebijakan dan inisiatif yang mendukung keamanan maritim di Selat Malaka, termasuk regulasi terkait pengawasan dan penegakan hukum di perairan tersebut.

Selain IMO, Indonesia juga berperan dalam organisasi regional seperti ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Dalam keamanan maritim, ASEAN memiliki forum seperti ARF (ASEAN Regional Forum) yang membahas berbagai isu keamanan di kawasan Asia-Pasifik, termasuk di Selat Malaka. Indonesia aktif berpartisipasi dalam ARF untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan upaya bersama dengan negara-negara anggota dan mitra dialog dalam mengatasi tantangan keamanan maritim di wilayah tersebut.

Selain ARF, Indonesia juga terlibat dalam forum-forum maritim regional lainnya seperti ASEAN Maritime Forum (AMF). AMF merupakan forum kerjasama maritim antara negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam bidang keamanan maritim, penegakan hukum, dan pengelolaan sumber daya laut di kawasan. Melalui partisipasi dalam AMF, Indonesia dapat berkolaborasi dengan negara-negara tetangga dalam mengatasi tantangan keamanan maritim di Selat Malaka.

Tidak hanya di tingkat regional, Indonesia juga berperan dalam organisasi internasional lainnya seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Indonesia merupakan anggota aktif dalam PBB dan terlibat dalam berbagai inisiatif yang berkaitan dengan keamanan maritim dan pengelolaan sumber daya laut secara global. Melalui partisipasi dalam forum-forum PBB, Indonesia dapat memperkuat kerjasama internasional dalam mengatasi masalah keamanan maritim yang melintasi batas-batas wilayah nasional, termasuk di Selat Malaka.

Peran Indonesia dalam organisasi internasional tidak hanya terbatas pada partisipasi formal, tetapi juga melalui diplomasi bilateral dan multilateral. Indonesia menggunakan kedudukannya sebagai anggota aktif dalam organisasi internasional untuk mempromosikan kebijakan dan inisiatif yang mendukung keamanan maritim di Selat Malaka. Melalui diplomasi maritim, Indonesia berupaya membangun kerjasama yang kuat dengan negara-negara lain dalam mengatasi tantangan keamanan di wilayah tersebut.

Dengan demikian, peran Indonesia dalam organisasi internasional, baik itu dalam forum regional maupun global, merupakan aspek penting dalam strategi diplomasi maritim untuk membangun keamanan maritim di Selat Malaka. Partisipasi aktif Indonesia dalam

berbagai organisasi internasional memberikan kesempatan untuk memperkuat kerjasama multilateral dalam mengatasi tantangan keamanan maritim yang kompleks dan lintas batas di wilayah tersebut.

Kapabilitas Maritim

Kapabilitas Maritim dalam analisis kebijakan diplomasi maritim Indonesia dalam membangun keamanan maritim di Selat Malaka memperlihatkan peningkatan kapasitas dan infrastruktur maritim Indonesia untuk menghadapi tantangan keamanan di wilayah tersebut. Kapabilitas maritim mencakup berbagai aspek seperti kekuatan militer, kemampuan pengawasan, dan infrastruktur maritim yang diperlukan untuk menjaga keamanan di perairan Selat Malaka.

Peningkatan kapasitas militer menjadi fokus utama dalam memperkuat kapabilitas maritim Indonesia. Pasal 5 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (Tentara Nasional Indonesia) mengamanatkan TNI untuk menjaga kedaulatan negara, termasuk keamanan di perairan wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia terus meningkatkan kemampuan angkatan lautnya untuk melakukan patroli dan penjagaan di perairan Selat Malaka. Ini mencakup modernisasi peralatan militer, pengadaan kapal patroli, dan peningkatan kemampuan personel.

Selanjutnya, kemampuan pengawasan dan pemantauan di perairan Selat Malaka menjadi kunci dalam menjaga keamanan maritim. Pasal 67 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap lalu lintas kapal di perairan Indonesia. Indonesia telah meningkatkan kapasitas pengawasan dan pemantauan dengan memperkuat sistem radar pantai, instalasi CCTV, dan pengembangan teknologi informasi untuk mengidentifikasi dan merespons ancaman keamanan secara cepat dan efektif.

Infrastruktur maritim juga menjadi fokus dalam memperkuat kapabilitas maritim Indonesia. Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan membangun infrastruktur maritim di wilayahnya. Indonesia telah melakukan investasi dalam pembangunan pelabuhan, dermaga, dan fasilitas maritim lainnya di sekitar Selat Malaka untuk mendukung operasi patroli dan pengawasan, serta meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan.

Selain itu, peningkatan kapabilitas maritim juga melibatkan pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang maritim. Pasal 10 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menekankan pelatihan dan sertifikasi bagi para pelaut untuk memastikan keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Indonesia terus meningkatkan program pelatihan dan pembinaan bagi personel angkatan laut, petugas keamanan, dan petugas penegak hukum maritim untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai ancaman di perairan Selat Malaka.

Dalam hubungan bilateral dan regional, peningkatan kapabilitas maritim Indonesia juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan interoperabilitas dan kerjasama teknis dengan negara-negara tersebut dalam hal patroli bersama, pertukaran informasi intelijen, dan latihan bersama untuk meningkatkan keamanan maritim di Selat Malaka.

Dengan demikian, peningkatan kapabilitas maritim Indonesia merupakan aspek penting dalam strategi diplomasi maritim untuk membangun keamanan maritim di Selat Malaka. Melalui modernisasi militer, peningkatan pengawasan dan pemantauan, pembangunan infrastruktur maritim, dan pelatihan sumber daya manusia, Indonesia

berupaya untuk memperkuat kemampuannya dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan di wilayah tersebut, serta memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga dan mitra regional dalam menjaga stabilitas dan keamanan maritim.

Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur dalam analisis kebijakan diplomasi maritim Indonesia dalam membangun keamanan maritim di Selat Malaka merupakan aspek yang penting dalam memperkuat kapabilitas dan kemampuan Indonesia dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut. Infrastruktur maritim yang baik merupakan pondasi yang diperlukan untuk melancarkan operasi pengawasan, penegakan hukum, dan penanggulangan berbagai ancaman di perairan Selat Malaka.

Pembangunan infrastruktur pelabuhan dan dermaga menjadi fokus utama dalam memperkuat infrastruktur maritim di sekitar Selat Malaka. Pelabuhan yang modern dan efisien dapat menjadi basis operasional bagi kapal patroli dan kapal penegak hukum untuk melakukan misi pengawasan dan penegakan hukum maritim. Selain itu, dermaga yang memadai memungkinkan kapal-kapal untuk bersandar dengan aman dan mendukung aktivitas logistik yang diperlukan dalam operasi maritim.

Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur maritim. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan membangun infrastruktur pelabuhan dan dermaga di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Ini memungkinkan pemerintah daerah di sekitar Selat Malaka untuk melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur maritim yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal, serta mendukung operasi keamanan maritim di wilayah tersebut.

Selain itu, pembangunan infrastruktur radar pantai dan stasiun pemantauan menjadi prioritas dalam meningkatkan kemampuan pengawasan dan pemantauan di perairan Selat Malaka. Radar pantai yang modern dan canggih memungkinkan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan di laut, seperti kapal yang berlayar tanpa izin atau mencoba menyelundupkan barang ilegal. Stasiun pemantauan yang dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi juga memungkinkan pertukaran informasi secara real-time antara lembaga penegak hukum maritim, angkatan laut, dan pihak berwenang lainnya untuk merespons ancaman keamanan dengan cepat dan efektif.

Pembangunan infrastruktur maritim juga meliputi investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, dan pertukaran data secara efisien dalam keamanan maritim. Pasal 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menetapkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan lalu lintas kapal dan keselamatan pelayaran. Dengan menggunakan sistem TIK yang canggih, pihak berwenang dapat melakukan pemantauan terhadap lalu lintas kapal, menganalisis pola pergerakan kapal, dan mendeteksi aktivitas mencurigakan di perairan Selat Malaka dengan lebih efektif.

Terakhir, pembangunan infrastruktur maritim juga harus memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Pasal 69 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menekankan perlindungan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pelayaran. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur maritim harus dilakukan dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan laut dan ekosistem pesisir, serta memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur maritim merupakan aspek penting dalam strategi diplomasi maritim Indonesia untuk membangun keamanan maritim di Selat Malaka. Melalui pembangunan pelabuhan, dermaga, radar pantai, stasiun pemantauan, dan

infrastruktur TIK yang modern dan efisien, Indonesia dapat meningkatkan kemampuan pengawasan, penegakan hukum, dan penanggulangan ancaman di perairan Selat Malaka, serta mendukung operasi keamanan maritim secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Analisis kebijakan diplomasi maritim Indonesia dalam membangun keamanan maritim di Selat Malaka menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kerjasama regional dan internasional, memperkuat kapabilitas militer dan infrastruktur maritim, serta membangun koalisi yang efektif dengan negara-negara tetangga dan mitra regional. Melalui kerjasama regional dalam forum seperti ASEAN dan ARF, serta perjanjian bilateral seperti Perjanjian Patroli Bersama, Indonesia berupaya mengatasi tantangan keamanan maritim di Selat Malaka dengan memperkuat pengawasan, penegakan hukum, dan pertukaran informasi intelijen. Peningkatan kapabilitas maritim melalui modernisasi militer, pembangunan infrastruktur pelabuhan, dermaga, radar pantai, dan stasiun pemantauan, serta investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi, menjadi landasan yang penting dalam menjaga keamanan maritim di wilayah tersebut. Keseluruhan upaya ini menegaskan peran strategis Indonesia dalam memastikan keamanan dan stabilitas di Selat Malaka, yang merupakan jalur maritim vital bagi perdagangan internasional dan kepentingan strategis global.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, S., & Wahyudin, Y. A. (2020). Workshop Diplomasi Maritim Memanfaatkan Posisi Strategis Indonesia dalam Jalur Perdagangan Dunia: Meninjau Selat Lombok-Selat Makassar. *Journal of Community Development & Empowerment*, 1(1), 31–40.
- Fadli, M. R., Rustam, I., & Munir, A. M. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pengajuan dan Penerapan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1), 35–54.
- Gonggong, A. (2020). Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Dengan Strategi Maritim Indonesia. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 8(2), 33–52.
- Iswardhana, M. R. (2023). Analisis Tata Kelola Maritim Indonesia: Implementasi Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 13(2), 125–139.
- Kusumawardhana, I. (2023). Diplomasi Triangular China Terhadap Indonesia Dalam Mengantisipasi Dilema Malaka Melalui Belt Road Initiative. *TheJournalish: Social and Government*, 4(2), 173–189.
- Ludiro Madu, S. I. P. (2020). MEMPERKUAT DIPLOMASI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN IDENTITAS MARITIM. *Menggagas Konsep Maritim 2045*, 107.
- Nugraha, O. N. R. A. C., & Syah, M. E. (2022). THE ASEAN-RUSSIA NAVAL EXERCISE (ARNEX) 2021: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA 2020–2024 DIBIDANG DIPLOMASI MARITIM DI MASA PANDEMI COVID-19 THE ASEAN-RUSSIA NAVAL EXERCISE (ARNEX) 2021: IMPLEMENTATION OF THE COUNTRY’S DEFENSE POLICY 2020–2024 IN THE FIELD OF MARITIME.
- Nursafitri, A., & Ramadhan, S. P. (2022). Diplomasi Maritim Indonesia di Kancan Internasional dengan Memaksimalkan Potensi Kemaritiman Kepulauan Riau. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 5(02), 1–9.
- Nurwahidin, A., & Utomo, A. W. (2020). Kepentingan Negara-Negara Pantai Menghadapi Ancaman Transnational Non State Actor Di Selat Malaka. *J. Marit. Indones*, 8, 189–217.
- Putri, F. E. M. (2021). Diplomasi Maritim Indonesia dalam Mewujudkan Tonggak Awal Poros Maritim Dunia Melalui Indonesia-Japan Maritim Forum (2016-2019).
- Qurgianto, A. W., & Marzaman, A. P. (2023). HUBUNGAN DIPLOMASI MARITIM DAN NAVIGASI LAUTAN ANTARA INDONESIA DAN RRT PADA MASA JABATAN MENTERI SUSI PUDJIASTUTI. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(3), 91–100.

- Samy, M., & Kusumadewi, J. A. (2021). Diplomasi Pertahanan Militer Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Non-Tradisional: Upaya Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), 45–62.
- Saputra, A. F., & Prasetyo, Y. (2022). Upaya Bakamla melaksanakan operasi keamanan laut di Selat Malaka. *DEFENDONESIA*, 6(2), 22–31.
- Suwarno, P., Sumantri, S. H., & Bahar, F. (2021). Rekonstruksi keamanan maritim Indonesia dalam rangka mewujudkan ketahanan wilayah (Studi di Kabupaten Natuna Periode tahun 2019-2020). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 65–89.
- Tarjuki, T. (2022). OPTIMALISASI SMART MARITIME DIPLOMACY GUNA MENDUKUNG KEAMANAN MARITIM INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(3), 754–761.
- Wicaksa, A. (2020). Strategi Keamanan Republik Indonesia di Selat Malaka. *Interdependence Journal of International Studies*, 1.
- Yudilla, A., & Amri, P. (2020). Analisa SWOT Kebijakan Poros Maritim Global di Wilayah Kepulauan Riau. *Nation State: Journal of International Studies*, 3(2), 230–240.
- Yudistira, J. A. (2023). KERJA SAMA PERTAHANAN LAUT INDONESIA: REALISME DALAM MELINDUNGI KEPENTINGAN MARITIM.
- Yunizar, F. D. (2023). Efektivitas Diplomasi Keamanan Maritim dalam Menangani Kasus Illegal Fishing di Laut Natuna. *Journal of Integrative International Relations*, 8(1), 1–14.